

## LAMPIRAN

**Lampiran 1. Tabel KTT ASEAN Beserta Hasil**

<b>KTT</b>	<b>Tempat/Tanggal Penyelenggaraan</b>	<b>Hasil</b>
<b>KTT ke 1</b>	Indonesia, Bali, 23-25 Februari 1976	Deklarasi Kerukunan ASEAN; Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC); serta Persetujuan Pembentukan Sekretariat ASEAN.
<b>KTT ke 2</b>	Malaysia, Kuala Lumpur, 4-5 Agustus 1977	Pencetusan Bali Concord 1
<b>KTT ke 3</b>	Filipina, Manila, 14-15 Desember 1987	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengesahkan kembali prinsip-prinsip dasar ASEAN.</li> <li>- Solidaritas kerjasama ASEAN dalam segala bidang.</li> <li>- Melibatkan masyarakat di negara-negara anggota ASEAN dengan memperbesar peranan swasta dalam kerjasama ASEAN.</li> <li>- Usaha bersama dalam menjaga keamanan stabilitas dan pertumbuhan kawasan ASEAN</li> </ul>

<b>KTT ke 4</b>	Singapura, 27-28 Januari 1992	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibentuknya Dewan ASEAN Free Trade Area (AFTA) oleh ASEAN untuk mengawasi, serta melaksanakan koordinasi.</li> <li>- Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Skema Tarif Preferensi Efektif Bersama (Common Effective Preferential Tariff/CEPT) menuju Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN.</li> </ul>
<b>KTT ke 5</b>	Thailand, Bangkok, 14-15 Desember 1995	Membicarakan upaya memasukan Kamboja, Laos, Vietnam menjadi anggota serta memperkuat identitas ASEAN.
<b>KTT ke 6</b>	Vietnam, Hanoi, 15-16 Desember 1998	Pemimpin ASEAN menetapkan <i>Statement of Bold Measures</i> yang juga berisikan komitmen mereka terhadap AFTA dan kesepakatan untuk mempercepat pemberlakuan AFTA dari tahun 2003 menjadi tahun 2002 bagi enam negara penandatanganan skema CEPT, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand.

<b>KTT ke 7</b>	Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, 5-6 November 2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengeluarkan deklarasi HIV/AIDS.</li> <li>- Mengeluarkan deklarasi Terorisme, karena menyangkut serangan terorisme pada gedung WTC di Amerika.</li> </ul>
<b>KTT ke 8</b>	Kamboja, Phnom Penh, 4-5 November 2002	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengeluaran deklarasi Terorisme, bagaimana cara-cara pencegahan.</li> <li>- Pengesahan ASEAN Tourism Agreement.</li> </ul>
<b>KTT ke 9</b>	Indonesia, Bali, 7-8 Oktober 2003	Pencetusan Bali Concord II yang akan dideklarasikan itu berisi tiga konsep komunitas ASEAN yang terdiri dari tiga pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASSC).
<b>KTT ke 10</b>	Laos, Vientiane, 29-30 November 2004	Program Aksi Vientiane (Vientiane Action Program) yang diluluskan dalam konferensi tersebut menekankan perlunya mempersempit kesenjangan perkembangan antara 10 negara anggota ASEAN, memperluas hubungan kerja sama dengan para mitra untuk membangun sebuah masyarakat ASEAN yang

		terbuka terhadap dunia luar dan penuh vitalitas pada tahun 2020
<b>KTT ke 11</b>	Malaysia, Kuala Lumpur, 12-14 Desember 2005	Perjanjian perdagangan jasa demi kerja sama ekonomi yang komprehensif dengan Korea Selatan, memorandum of understanding (MoU) pendirian ASEAN-Korea Center, dan dokumen hasil KTT Asia Timur yang diberi label Deklarasi Singapura atas Perubahan Iklim, Energi, dan Lingkungan Hidup
<b>KTT ke 12</b>	Filipina, Cebu, 12-13 Januari 2007	Membahas masalah-masalah mengenai keamanan kawasan, perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), keamanan energi Asia Tenggara, pencegahan dan pengendalian penyakit AIDS serta masalah nuklir Semenanjung Korea
<b>KTT ke 13</b>	Singapura, 18–22 November 2007	Penandatanganan beberapa kesepakatan, antara lain seperti piagam ASEAN, perjanjian perdagangan dalam kerangka kerjasama ekonomi, penandatanganan kerjasama ASEAN dengan Korea Center, menyepakati ASEAN Center,
<b>KTT ke 14</b>	Thailand, Cha Am, Hua Hin, 27 Februari-1 Maret 2009	Penandatanganan persetujuan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru

<b>KTT ke 15</b>	Thailand, Cha Am, Hua Hin , 23 Oktober 2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penandatanganan Deklarasi Cha-am Hua Hin tentang Peresmian Komisi HAM antar pemerintah ASEAN</li> <li>- Penandatanganan Deklarasi Cha-am Hua Hin tentang Penguatan Kerja Sama Pendidikan untuk mencapai Komunitas ASEAN.</li> </ul>
<b>KTT ke 16</b>	Vietnam, Hanoi. 8-9 April 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan kembali dan perkembangan yang berkelanjutan ekonomi ASEAN serta penanganan bersama perubahan iklim.</li> <li>- Mempercepat realisasi pembentukan Masyarakat ASEAN pada tahun 2015.</li> <li>- Mempercepat integrasi ekonomi ASEAN, membentuk pola yang mengadaptasi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan</li> <li>- Meningkatkan kerja sama ekonomi dan moneter Asia Timur, di antaranya ASEAN harus</li> </ul>

		<p>mempertahankan status intinya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berupaya bersama masyarakat internasional mengatasi masalah global.</li> </ul>
<b>KTT ke 17</b>	Vietnam, Hanoi, 28-30 Oktober 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan Komunitas ASEAN tahun 2015 serta isu-isu kawasan dan internasional lainnya</li> <li>- Pembangunan Komunitas ASEAN yaitu ASEAN Connectivity.</li> <li>- Peningkatan peran ASEAN dalam G-20</li> </ul>
<b>KTT ke 18</b>	Indonesia, Jakarta, 4-8 Mei 2011	<p>Konektivitas ASEAN, Ketahanan Pangan dan Energi, Penyelesaian Konflik, Arsitektur Kawasan Asia Timur, people centered ASEAN, kerja sama penanganan bencana alam, kerja sama sub-kawasan, penyelenggaraan East Asia Summit, permohonan Timor Leste menjadi anggota ASEAN dan Permohonan pertukaran Keketuaan antara Myanmar dan Laos.</p>
<b>KTT ke 19</b>	Indonesia, Bali, 17-19 November 2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan Masyarakat ASEAN dengan tiga pilar utama: politik-</li> </ul>

		<p>keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyangkut masalah ASEAN Connectivity dan Piagam ASEAN.</li> <li>- Penguatan pertumbuhan ekonomi di kawasan, menata arsitektur kerja sama kawasan yang lebih efisien dan efektif, menjaga stabilitas dan keamanan Asia Tenggara, penguatan peran ASEAN secara global, memperkuat ekonomi kawasan Asia Timur, membangun landasan dan tindakan nyata, mengatasi tantangan di kawasan, serta memelihara perdamaian, keamanan dan stabilitas dan ketertiban di kawasan Asia Timur.</li> </ul>
<b>KTT ke 20</b>	Kamboja, Phnom Penh, 3-4 April 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deklarasi Phnom Penh (Phnom Penh Declaration on ASEAN : One Community, One Destiny), Agenda Pembangunan Komunitas ASEAN (Phnom Penh Agenda</li> </ul>

		<p>on ASEAN Community Building)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drug-Free ASEAN 2015.</li> <li>- Kerjasama antara Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Pembangunan Komunitas ASEAN.</li> </ul>
<b>KTT ke 21</b>	Kamboja, Pnom-Penh, 17-20 November 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembicaraan masalah pertikaian Laut Tiongkok Selatan</li> <li>- Penandatanganan dokumen bersejarah adopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (ADHR).</li> </ul>



## **Lampiran 2. Wawancara dengan Staff Divisi Advokasi Internasional KONTRAS**

Narasumber/Kode: Paulus/P dan Raden Arif Nurfikri, S.H /R.A

Tanggal: 30 Mei 2018

Tempat: Kantor KONTRAS, Jl. Kramat II No.7, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat

Wawancara dimulai dengan Paulus, staff divisi advokasi internasional:

1. Bagaimana kerjasama KONTRAS dengan NGO-NGO di ASEAN?

P: Jadi data yang saya punya ya... Sebenarnya kalo mbak minta secara spesifik ke ASEAN itu kami sebenarnya yang saya dapet cuma 2, cuma 2 kalo kerjasama yang spesifik ke ASEAN, kalo tanya ke ruang lingkup yang lebih luas ke Asia baru kami mempunyai banyak, tapi kalo ASEAN kami punya dua, satu namanya SAPA Forum, itu ngomongin soal isu HAM di Negara ASEAN, itu soal advokasi NGO-NGO di ASEAN kasus yang lagi santer sekarang Rohingya, itu di inisiasi sama Forum Asia salah satunya, Forum Asia sekretariatnya ada disini, satu lagi itu tidak spesifik soal HAM kerjasama namanya ... ASEAN Forum ... itu konferensi NGO-NGO juga se-ASEAN tapi ngomongnya lebih luas lagi tidak hanya soal HAM... jadi yang saya ketemu cuma dua kalo yang soal ASEAN

2. Terus program-programnya gimana mas? Ada spesifik kerjasamanya gitu mas?

P: Biasanya program kerjasamanya tuh hanya di ini sih mbak... Hanya soal karena kita masuknya tentang masalah advokasi tuh sebenarnya sulitnya dari mekanisme internasional kan kita gak bisa langsung datang ke Negara itu bikin apa segala macam karena kita bertubrukan dengan masalah kedaulatan kan... Maksudnya masalah kemanusiaan pasti bertubrukannya sama itu... jadi yang bisa kita lakukan hanya paling sejauh ini... kita datang kesana nyari tahu fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan itu seperti apa... lalu kita cocokan dengan sama apa sih yang beredar di media ini, sirkulasi beritanya seperti apa habis itu kita bikin siaran pers dan lain-lain... untuk meluruskan oh kalo yang di Myanmar misalnya media ngomong begini ternyata kita temuannya begini... Hanya sampai situ... karena menurut saya pribadi emang sulit... kalo kita mau mengadvokasi isu-isu HAM internasional karena sifatnya tidak mengikat... apapun yang kita lakukan di level internasional tuh sifatnya tidak mengikat karena lagi-lagi Negara pasti ngomongnya kami Negara berdaulat... ini urusan kamilah... jadi kadang-kadang politisi sekali... jadi kalo yang di ASEAN sih em... isu yang lagi digodok dengan lumayan intens itu memang Rohingya dan kerjasamanya bentuknya yang saya temuin cuma dua.... Kalo ternyata ada lebih mungkin nanti saya minta email mbak kali ya... habis itu saya minta tolong temen saya Fatya (Kepala Divisi) untuk kirim list file yang lengkap.

3. Oh iya mas, selain itu saya juga ingin mengetahui internnya KONTRAS itu sendiri sih, soalnya belum mengetahui secara dalam, kan KONTRAS juga aktif dalam melakukan demonstrasi, aksi-aksi solidaritas internasional, itu tuh ada kerjasama dengan institusi lain gak sih kayak untuk membuat demonstrasi itu biasanya ngajak masyarakat, itu cara-cara KONTRAS itu bagaimana?

P: Kalo aksi yang dilakukan KONTRAS yang didalam negeri gitu yaa... yang didalam negeri itu biasanya sebenarnya banyak soal isu HAM dalam negeri juga sih mbak sebenarnya... kebanyakan yang kita dampingin itu sebenarnya aksi-aksi HAM dalam negeri... kalo... jadi KONTRAS sendiri sebenarnya punya divisi khusus namanya divisi internasional yang adalah divisi yang memiliki anggota Fatya (kepala divisi) dan saya... divisi advokasi internasional ini sebenarnya sedikit berbeda dengan persepsi orang-orang tentang KONTRAS karena kalo mbak misalnya... kita sebut nama KONTRAS... pasti yang ke TOP UP adalah... oh KONTRAS orang-orangnya ketemunya sama korban dan lain-lain... tapi divisi saya hampir tidak pernah bersentuhan sama korban... karena kami biasanya bertemu dengan orang-orang yang memangku jabatan atau pengambil keputusan... orang-orang Duta Besar... atau KEMENLU ... atau dari INGO lainnya ... misalnya dari INGO yang lain yang mau ngajak Indonesia bergabung dalam Joint Force nya mereka gitu ya... mereka harusnya mengajak KONTRAS dulu... jadi kami hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertemu korban dan lain-lain... nanti malah jadinya kontradiktif... jadi kalo yang dalam negeri lain lagi (divisinya)... yang dibelakang saya ini

orang-orang yang didivisi dalam negeri... advokasi HAM yang kontemporer, sekarang, dan yang masa lalu... jadi ada pembagian... jadi di KONTRAS sendiri dibagi jadi 2, advokasi internasional dan advokasi dalam negeri... advokasi yang didalam negeri ini dipecah lagi... jadi yang masa lalu dan kontemporer... kontemporer itu termasuk juga menangani isu HAM yang soal ekonomi, sosial, dan budayaa... isu HAM tetang hak untuk mendapatkan jaminan rumah... hak untuk buruh... itukan HAM-HAM yang kontemporer....satu lagi yang paling tinggi TASK... kasus yang udah lama dan belum diselesaikan oleh Negara... jadi itu pembagiannya... dan divisi saya relatif jarang berdamangan langsung dengan korban

4. Jadi mas kurang tau yaa bagaimana cara menarik/mobilisasi masyarakat biar bersedia terlibat dalam sebuah aksi?

P: Itu eeemm... ranahnya bukan ranah saya ngomong... itu ada ranahnya lagi sebenarnya .... Itu namanya Biro Kampanye dan Jaringan... mereka yang apa namanya... yang incharge untuk ngabarin jaringan... atau kontak yang lain-lain... kalo misalnya biro mau melakukan aksi dan lain-lain...

5. Jadi sejauh ini cuma itu saja ya mas, soalnya saya juga kan ngulik di website KONTRAS saya cuma ketemu kerjasama internasionalnya makanya kebetulan karena saya ngambilnya di Asia Tenggara.....

P: Kalo di Asia gak bisa masuk kebahasan mbak? Soalnya kami yang banyak judul ASIAN...

kayak misalnya ASIA alliance .... Habis itu aliansi ASIA untuk melawan hukuman mati misalnya... kebanyakan levelnya di ASIA .....

6. Oh jadi memang lebih fokusnya ke ASIA ya mas?

P: ASEAN itu sebenarnya selalu sulit karena prinsip keamanan mereka adalah prinsip non-intervention kan... jadi terbenturnya di hal-hal seperti itu....

7. KONTRAS juga diundang ya mas didalam sidang Jenewa tahun 2013. Itu ikut sidang atau juga menjadi pembicara gitu mas?

P: Ikut sidang... jdi kita ngajuin status sebagai staff... labelnya itu konsultatif... jadi KONTRAS itu sudah dapatkan status itu... Jadi tahun ini kita akan ngajuin lagi... bulan ini malah... sorry bulan juni akan proses ngajuin ulang lagi... status KONTRAS sebagai konsultatif... jika suatu NGO sudah mendapatkan status itu dari PBB, maka dia akan diundang... kita akan ngasih pemukhtahiran kasus-kasus HAM di Indonesia dari data kita sendiri... kita akan kasih rekomendasi buat Negara juga... jadi kita ikut langsung datang... Tapi memang prosesnya agak memakan waktu yang panjang... PBB kasih status itu nggak mudah-mudah gitu loh... status konsultataif... jadi sebenarnya NGO mana aja bisa aja sih... kalo memang punya kemauan dan kapasitas di PBB... mereka bisa ngajuin status tersebut... dan mungkin kenapa diterima karena kita selama ini sudah membangun komunikasi yang intens sama misalnya dewan HAM di PBB... jadi kalo kita

ada laporan apa-apa yang sudah mentok... salah satu opsinya yaa kita bawa ke luar ntah melalui Kedutaan Besar, ntah lewat INGO, atau lewat mekanisme PBB... PBB kan sebenarnya punya mekanisme yaitu semacam Universal Review gitu jadi dia akan accept secara *random* dalam satu kloter itu misal Negara A mengawasi Negara apa... nah di kloter itulah nanti kita buka-bukaan tuh Negara... dia akan mengkritik Negara dari apa yang berdasarkan dari laporan dari NGO-NGO seperti KONTRAS ataupun temuannya Negara mereka sendiri... tapi lagi-lagi kembali lagi... kadang-kadang jadi politisi juga... karena misalnya Indonesia mendapatkan Negara kayak Australia misalnya... mungkin Australia tidak bisa ngomong banyak... tidak bisa ngomong terlalu tajam ke Indonesia... karena warga Negara dia ada yang lagi Defro (ngantri hukuman mati)... kalo dia misalnya ngomong tajam... Indonesia marah... jadi politis... jadi situasi kayak gini politis banget... atau misalnya kita dapat Nigeria ... Nigeria karena dia ngerasa udah selalu dikambing hitamkan gitu yaa... Seperti labeling orang Indonesia yang menuding orang Nigeria sebagai gembong Narkoba jadi mereka bisa ngomong tajam (kritik)... tapi kita gak tahu... karena itu bener-bener diacak secara random satu kloter itu... mekanisme PBB itu outputnya hanya memberi tekanan internasional karena yang terakhir Indonesia dikasih desakan untuk ratifikasi optional proker tentang anti penyiksaan... jika kita udah ratifikasi itu... maka lapas-lapas, polisi-polisi yang nangkap penjahat misalnya atau pas dilapas udh ditahan... tidak boleh ada sama sekali bentuk

penyiksaan mental maupun fisik... dan karena Indonesia belum mau ratifikasi platform itu... jadi kita gak bisa ngomong banyak menyangkut permasalahan seperti itu...

8. Baik terimakasih mas, sebenarnya saya ingin mengetahui lebih mengenai KONTRAS di ASEAN tapi karena memang memiliki keterbatasan saya...

P: Benturan koalisi NGO ini sebenarnya seperti yang tadi saya bilang hanya karena prinsip ASEAN yang non intervensi... jadi hal-hal yang kita lakukan sifatnya... hal-hal advokasi yang bisa kita lakukan sifatnya hanya seperti desakan-desakan doang...

9. Tapi KONTRAS ada menggunakan upaya sampai dibawa ke forum ASEAN gitu, misalnya ASEAN Summit?

P: Kalo ASEAN Summit saya masih ragu sih... mungkin saya harus check dulu... tapi yang pasti tuh kita pernah diundang ketika pembahasan PBB tentang UPR, kita direview sama semua Negara... nah NGO itu juga punya peran penting didalam sidang PBB... UPR itu mekanisme untuk memberikan masukan kepada Negara... terus kayak check and balances apa-apa aja yang udah dilakukan oleh Negara...

10. Itu pendampingan yang dilakukan KONTRAS terhadap korban pelanggaran HAM benar-benar didampingi sampai selesai mas?

P: Iya... idealnya seperti itu... kita selalu mengawal si korban sama keluarga korban ini dalam upaya penyelesaian kasusnya... dan kadang pelanggaran HAM di masa lalu itu sifatnya udah deathlock gitu yaaa...

maksudnya itu berkaitan sama institusi yang memiliki kekuasaan kan yaa... jadi yang bisa dilakukan KONTRAS adalah merawat hubungan dengan korban sama kita... kalo untuk kasus masa lalu itu sekarang fokusnya melalui jalur non-mitigasi... deathlock itu kan cuma di mekanisme hukumnya... nah mekanisme hukum itu istilahnya sudah sangat buntu karena adanya imunitas dan political willingness yang dijalankan Negara... jadi kita mengambil jalan untuk mengeluarkan kampanye-kampanye sama advokasi non-mitigasi... contohnya kita membuat event... yang kedua diakomodir dalam literature nasional dan internasional .. adanya pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi... itu salah satu caranya

11. Saya sebenarnya juga ingin menanyakan masalah internal mas, KONTRAS sendiri kan ada di Surabaya, Papua, itu mereka jalan masing-masing atau emang ada hubungan dan dalam penindakan permasalahan HAM itu ada pembatasannya gitu ke masing-masing cabang?  
 P: Yang dibelakang saya adalah bang Arab adalah kepala divisi advokasi yang dalam negeri, jadi dia yang bisa ngomong soal hubungan antara KONTRAS-KONTRAS didaerah... ada Aceh, Surabaya, Papua, Makassar, dll... hubungannya sifatnya seperti apa... nanti kalo saya yang ngomong kan takutnya kurang detail kan, dan memuaskan...

Kemudian Paulus meninggalkan wawancara dan memanggil Raden Arif untuk berpartisipasi dalam wawancara...



1. Saya sebenarnya juga ingin menanyakan masalah internal mas, KONTRAS sendiri kan ada di Surabaya, Papua, itu mereka jalan masing-masing atau emang ada hubungan dan dalam penindakan permasalahan HAM itu ada pembatasannya gitu ke masing-masing cabang?  
R.A: Kalo kami hubungan dengan KONTRAS di daerah... itu sebenarnya kalo dikatakan secara koordinatif atau koordinasi itu sebenarnya gak ada... karena masing-masing wilayah itu dia punya yang namanya ee... Badan... badan pengurus...tapi karena memang dulu atas inisiatifnya dari teman-teman... teman-teman daerah dan teman-teman Jakarta... kalo terkait intervensi atau segala macam gak ada sama sekali... karena tadi niatnya emang mau dibentuk suatu Federasi ya dan... dimana KONTRAS-KONTRAS wilayah itu punya kewenangan masing-masing.
  
2. Jadi sekarang KONTRAS wilayah punya kapasitas wewenang masing-masing dan tidak ada hubungan sama sekali?  
R.A: Iyaa... gak ada hubungan... tapi kita kadang bisa saling membantu KONTRAS-KONTRAS daerah ... ataupun ketika temen-temen KONTRAS daerah mau ke Jakarta kita fasilitasi... kalo misalnya bersifat intrusksi ke teman-teman wilayah atau daerah itu gak ada...
  
3. Terus Dewan Federasi KONTRAS itu bagaimana perannya?  
R.A: Belum ada... jadi masing-masing wilayah itu bertanggung jawab dengan dewan pengurusnya masing-masing...

4. Jadi apakah ada batasan, misalnya terjadi pelanggaran HAM di Surabaya, jadi apakah yang bertindak langsung KONTRAS Surabaya?

R.A: Bisa KONTRAS Surabaya... bisa KONTRAS Jakarta...gak ada pembatasan sama sekali... tapi memang dalam pembentukan beberapa kantor-kantor wilayah ini memang inisiatif dari KONTRAS Jakarta... tapi dalam konteks kerja kita gak bisa melakukan intervensi terhadap daerah... karena masing-masing KONTRAS punya dewan pengurus itu... jadi mereka bertanggung jawab dengan dewan pengurus mereka....

5. Bagaimana pendampingan korban tindak pelanggaran HAM? KONTRAS ada staff khusus gak ya untuk mendampingi?

R.A: Kan didalam salah satu tujuan KONTRAS terbentuk itu adalah advokasi... teman-teman KONTRAS memang punya kemampuan untuk melakukan advokasi... jadi kayak saya yang backgroundnya hukum... fokusnya kepada masalah hukum... kayak misalnya ada yang fokusnya pendampingan atau advokasi pelanggaran masa lalu... jadi ada masing-masing biro dan desk-nya... jadi setiap advokasi yang kita lakukan... misalnya saya... saya mengadvokasi kasus A... dari kasus A ini saya bawa advokasi ke tingkat nasional... nanti sama teman-teman advokasi internasional di advokasi lagi ke tingkat internasional...

### Lampiran 3. Wawancara via Email dengan Fatya Maulidiyanti (Kepala Divisi Advokasi Internasional)









